TESIS

**KEDUDUKAN PEKERJA UNTUK MENDAPATKAN HAK
PADA PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT**

Oleh

FAISAL

NIM 2120215310067

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2023

**KEDUDUKAN PEKERJA UNTUK MENDAPATKAN HAK
PADA PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh

**FAISAL
NIM. 2120215310067**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2023

Judul Tesis : Kedudukan Pekerja Untuk Mendapatkan Hak Pada Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit

Nama : Faisal
NIM : 2120215310067

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing Utama

Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002

Pembimbing Pendamping

Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 19690716 199403 2 002

Diketahui,

Koordinator Program Magister Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Prof. Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tanggal Lulus:

Tanggal Wisuda:

**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal.....**

Pembimbing utama

**Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002**

Pembimbing Pendamping

**Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 19690716 199403 2 002**

**Disahkan Oleh
Koordinator Program Magister Hukum**

**Prof. Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**Prof. Dr. Achmad Faishal., S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

**Tesis ini Telah Dinilai dan Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal.....**

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H

Anggota : 1. Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

: 2. Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

: 3. Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : FAISAL
NIM : 2120215310067
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Hukum Ekonomi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 26 Juli 2023
Yang Membuat Pernyataan

FAISAL
NIM. 2120215310067

FAISAL. 2023. KEDUDUKAN PEKERJA UNTUK MENDAPATKAN HAK PADA PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Dr. Saprudin, S.H., LL.M. dan Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum. 110 halaman.

RINGKASAN

Ketika membangun dan menjalankan sebuah usaha atau perusahaan, para pengusaha pastinya membutuhkan pekerja yang ahli di bidangnya masing-masing agar perusahaan dapat berjalan atau beroperasi sehingga perusahaan dapat menghasilkan keuntungan, mendapatkan penghasilan dan membayar hak pekerjanya. Namun sebuah usaha atau perusahaan tidak selalu berjalan sesuai harapan dan rencana yang diinginkan. Selalu ada hal-hal yang tidak diinginkan, resiko, dan kerugian hingga hal terburuk adalah mengalami kemunduran atau kebangkrutan dan itu merupakan hal yang wajar dalam menjalankan sebuah bisnis. Ada beberapa hal yang dapat menjadi penyebab bisnis tidak dapat berjalan sesuai rencana, baik dari internal maupun eksternal perusahaan tersebut.

Terlebih di era globalisasi ini, kehadiran perusahaan-perusahaan ternama semakin meningkat.

Hal ini juga meningkatkan daya saing antar perusahaan. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa beberapa perusahaan, bahkan perusahaan-perusahaan besar dan mapan sekalipun, tidak mampu bersaing, sehingga mengalami kerugian lalu mengalami kebangkrutan dan akhirnya dinyatakan pailit. Kepailitan adalah suatu keadaan dimana seorang debitur mengalami kondisi kesulitan secara finansial untuk membayar utangnya yang akhirnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak mampu membayar utangnya. Dikutip juga dari Otoritas Jasa Keuangan Indonesia atau OJK, definisi pailit adalah debitur yang memiliki dua atau lebih kreditur yang tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pihak debitur tersebut dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan yang berwenang.

Dampak dari kepailitan ini adalah yaitu kekayaan debitur ditempatkan dibawah penyitaan sehingga debitur tidak dapat memiliki hartanya kembali. Akibatnya, dalam berbagai kasus kepailitan yang muncul, para pekerja seringkali tidak dapat memperoleh hak untuk membagikan harta pailit tersebut, terutama ketika bersaing dengan tagihan-tagihan pajak negara, karena mereka tidak dapat bersaing dengan kreditur lain. Jika pekerja dan pengusaha saat menentukan perjanjian kerja dan sudah terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan artinya pekerja serta perusahaan sudah terikat satu sama lain, yang menghasilkan kesepakatan, dimana kesepakatan menghasilkan hak dan kewajiban yang harus dijalankan kedua belah pihak sebagaimana yang telah ada pada perjanjian kerja dan peraturan yang berlaku di perusahaan. Para pihak pekerja dan pengusaha harus melaksanakan perjanjian kerja dan peraturan perusahaan, pihak pekerja harus bertanggung jawab apabila melanggar perjanjian kerja dan peraturan yang ditetapkan di perusahaan, dan

sebaliknya jika pengusaha tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati dan peraturan yang ditetapkan di perusahaan maka pengusaha itu harus bertanggung jawab kepada pekerja.

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk memberikan analisis mengenai hak-hak pekerja apakah bisa mendapatkan hak mereka apabila perusahaan tempat mereka bekerja mengalami kepailitan.

Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memperoleh data dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Oleh karena itu perlu dilakukan telaah kepustakaan dengan berpedoman kepada literatur, baik berupa buku-buku, jurnal hukum, maupun peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Akibat dari perusahaan yang dinyatakan pailit, adalah kurator dapat melanjutkan kegiatan usaha walaupun putusan atas penetapan pailit diajukan upaya hukum. Sehingga beroperasi atau tidaknya perusahaan setelah dinyatakan pailit, akan tergantung kepada penilaian kurator terhadap prospek peluang kegiatan perusahaan jika dioperasikan. Namun jika kurator menilai pengoperasian perusahaan tidak akan menghasilkan prospek yang diinginkan, maka hakim pengawas akan menghentikan operasi perusahaan, kemudian kurator dapat mulai menjual aktiva boedel dan menyelesaikan pembayaran-pembayaran yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Prioritas pembayaran utang perusahaan yang pailit dapat diurutkan sebagai berikut: upah pokok pekerja yang belum dibayarkan; tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah; kreditur separatis; dan hak-hak pekerja lainnya seperti pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.
2. Terhadap pekerja yang dilakukan pemutusan hubungan kerja dikarenakan terjadinya kepailitan pada perusahaan, berhak mendapatkan upah yang sebelumnya belum dibayarkan, uang pesangon satu kali, uang penghargaan masa kerja satu kali, dan uang penggantian hak. Langkah hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja agar hak-haknya dapat dipenuhi oleh perusahaan yang pailit, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, adalah pekerja dapat menempuh langkah hukum, diantaranya hukum sebagai berikut: Bipartit, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase, atau Pengadilan Hubungan Industrial.

FAISAL. 2023. KEDUDUKAN PEKERJA UNTUK MENDAPATKAN HAK PADA PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : **Dr. Saprudin, S.H., LL.M.** dan Pembimbing Pendamping : **Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.** 110 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Hak Pekerja, Perusahaan, Pailit.

Tujuan Penelitian untuk memberikan analisis mengenai hak-hak pekerja apakah hak pekerja dapat didahulukan sebagai penerapan asas terkait hak pekerja pada perusahaan yang dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji terkait langkah hukum jika para pihak tidak memenuhi hak pekerja sebagaimana mestinya.

Dari hasil penelitian ini memperlihatkan sesungguhnya yaitu, bahwa: **Pertama** akibat dari perusahaan yang dinyatakan pailit, adalah kurator dapat melanjutkan kegiatan usaha walaupun putusan atas penetapan pailit diajukan upaya hukum. Sehingga beroperasi atau tidaknya perusahaan setelah dinyatakan pailit, akan tergantung kepada penilaian kurator terhadap prospek peluang kegiatan perusahaan jika dioperasikan. Namun jika kurator menilai pengoperasian perusahaan tidak akan menghasilkan prospek yang diinginkan, maka hakim pengawas akan menghentikan operasi perusahaan, kemudian kurator dapat mulai menjual aktiva boedel dan menyelesaikan pembayaran-pembayaran yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Prioritas pembayaran utang perusahaan yang pailit dapat diurutkan sebagai berikut: upah pokok pekerja yang belum dibayarkan; tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah; kreditur separatis; dan hak-hak pekerja lainnya seperti pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. **Kedua**, terhadap pekerja yang dilakukan pemutusan hubungan kerja dikarenakan terjadinya kepailitan pada perusahaan, berhak mendapatkan upah yang sebelumnya belum dibayarkan, uang pesangon satu kali, uang penghargaan masa kerja satu kali, dan uang penggantian hak. Langkah hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja agar hak-haknya dapat dipenuhi oleh perusahaan yang pailit, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, adalah pekerja dapat menempuh langkah hukum, diantaranya hukum sebagai berikut: Bipartit, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase, atau Pengadilan Hubungan Industrial.

FAISAL. 2023. THE STATUS OF EMPLOYEES TO OBTAIN RIGHTS IN COMPANIES DECLARED BANKRUPT. *Masters Of Laws Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor I : Dr. Saprudin, S.H., LL.M. and Advisor II : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum. 110 Pages.*

ABSTRACT

Keywords: *Rights of Workers, Companies, Bankruptcy.*

*The research objective is to provide an analysis of workers' rights whether workers' rights can take precedence as the application of the principle related to workers' rights in companies that are declared bankrupt under the law. This research also aims to examine legal steps if the parties do not fulfill workers' rights as they should. The results of this study show that: **First**, the legal consequence of a company being declared bankrupt is that the curator can continue business activities even though a legal remedy is filed for a bankruptcy decision. So that the operation or not of the company after being declared bankrupt will depend on the curator's assessment of the prospects for the company's activities if it is operated. However, if the curator judges that the company's operations will not produce the desired prospects, the supervisory judge will stop the company's operations, then the curator can start selling Boedel assets and complete the payments that must be paid by the company. Priorities for paying the debts of bankrupt companies can be sorted as follows: unpaid basic wages of workers; state bill of rights, auction offices, and public bodies set up by the government; separatist creditors; and other workers' rights such as the provision of severance pay, long service pay, and compensation for rights that should be received. **Second**, workers who are terminated due to bankruptcy at the company are entitled to wages that have not previously been paid, one-time severance pay, one-time service pay, and rights replacement pay. Legal steps that can be taken by workers so that their rights can be fulfilled by bankrupt companies, based on Law Number 2 of 2004 concerning the Settlement of Industrial Relations Disputes, workers can take legal steps, including the following laws: Bipartite, Mediation, Conciliation, Arbitration, or Industrial Relations Court.*

HALAMAN PERSEMBAHAN

KUPERSEMBAHKAN TESIS DAN GELAR AKADEMIK INI
DENGAN NIAT UNTUK MEMBAHAGIAKAN KEDUA ORANG TUA
DAN KELUARGA SEBAGAI PERWUJUDAN PENGABDIANKU KEPADA
ALLAH SWT.

UNTUK ORANG – ORANG
TERCINTA:

KEDUA ORANG TUA PENELITI,
RIYADH BAHWERES DAN ROSYDAHANA ATAS DUKUNGAN MORAL
DAN MATERIL,
SERTA ATAS SEGALA DOA YANG TIADA HENTI TERUCAP, KASIH
SAYANG SERTA DUKUNGAN YANG TAK TERNILAI, TELAH
DIBERIKAN KEPADA PENELITI.

GURU, DOSEN, KELUARGA, CALON ISTRI, SENIOR DAN TEMAN-
TEMAN ATAS DOA MOTIVASI DAN SEMANGAT YANG
DIBERIKAN KEPADA PENELITI.

PENELITI UCAPKAN TERIMAKASIH YANG SEBESAR- BESARNYA
ATAS SELURUH DOA DAN DUKUNGAN YANG TELAH DIBERIKAN
SELAMA INI.

**“Kalau pengetahuan anda mau ditambah oleh Allah, mudah dalam belajar,
kuat dalam ingatan. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan
ajarkan anda pengetahuan (ilmu)”.**

-Ust. Dr. (H.C.) Adi Hidayat Lc., M.A.-

Man Ana Laulakum

Siapakah diriku, siapakah diriku kalau tiada bimbingan kalian (guru)

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan nikmat-Nya peneliti mampu menyelesaikan sebuah karya berupa Tesis dalam rangka syarat mendapatkan gelar Magister hukum ini. Shalawat serta salam tak lupa peneliti curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik sehingga peneliti bisa merasakan nikmat Islam sekarang.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata-2 Magister Hukum, di Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dan Tesis ini diberi judul “**KEDUDUKAN PEKERJA UNTUK MENDAPATKAN HAK PADA PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT**”. Dalam penelitian Tesis ini peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih perlu penyempurnaan dalam berbagai hal, baik ditinjau dari segi isi, penyajian materi maupun bahasannya. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh peneliti, untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan sekali demi menjadikan Tesis ini lebih baik lagi.

Selama menempuh kuliah dan menyelesaikan penelitian hukum Tesis ini, peneliti telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka sudah sepatutnya pula dalam kesempatan yang sangat berharga ini, peneliti menyampaikan penghormatan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan Bapak Prof. Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum yang telah memberikan persetujuan dan memperkenankan peneliti untuk menyelesaikan tesis ini hingga akhir;

2. Yang terhormat Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M. dan Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah sabar untuk meluangkan sebagian waktu dan memberikan Ilmu Pengetahuan, saran dan arahan dalam membimbing kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian Tesis ini;
3. Yang terhormat Bapak Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum., Bapak Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum. dan Bapak Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H. selaku Penguji Tesis yang telah meluangkan waktu dan memberikan saran, masukan dan arahan pada Penelitian Tesis ini;
4. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan kepada peneliti sehingga dapat ke tahap menyelesaikan penelitian Tesis ini;
5. Seluruh Staf Akademik, beserta karyawan dan karyawan Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat lainnya yang telah membantu kelancaran dan kemudahan peneliti sejak mengikuti perkuliahan sampai akhir penyelesaian studi ini;
6. Abi, Ummi, Abang, Kaka dan seluruh keluarga. Drs. Riyadh Bahweres, Rosydahana, Najiah, S.Pd., M.Pd., Chandra, S.Km., M.Km., serta Tasya Endira Salsabila, S.H., yang tidak pernah lepas memberikan doa, dukungan dan semangat yang selalu diberikan kepada peneliti. Tanpa Abi dan Ummi, peneliti tidak akan pernah berada di tempat sekarang ini. Semoga Allah SWT membalas segala apa yang telah Abi dan Ummi berikan kepada peneliti. Peneliti tak akan sanggup membalas jasa-jasa mereka selama ini, semoga gelar ini bisa membawa keberkahan dalam keluarga peneliti;
7. Kepada Presiden Direktur PT. Global Arta Borneo, H. Muhammad Zain dan Presiden Direktur PT. Anugerah Lancar Indo Makmur, H. Endra Agus Salim yang telah memberikan dukungan langsung maupun tidak langsung kepada peneliti dalam menempuh perkuliahan;

8. Kantor Trading Coal, Legal Consultan, Finance, pimpinan, senior, dan rekan kerja peneliti yang memberikan pengalaman dan praktik kerja dalam dunia hukum bisnis;
9. Serta senior peneliti dalam jenjang Strata 2 yang telah memberikan saran dan masukan dalam kegiatan atau proses akademis kepada peneliti, yaitu Ahmad Azhar Yasir, S.H., M.H. dan Iqbal Fikri, S.H., M.H. dan tidak lupa juga kepada teman seperjuangan Aulia Rahman, S.H., Grup WA CMH (Calon Magister Hukum) Abdan Noor Ramadhan Halidi, S.H., Muhammad Arief, S.H., Achmad Bangsawan, S.H., Venta Justitia, S.H., Catalina Moeliani, S.H., dan Fenny Wulanpurnamasari, S.H.;
10. Kepada keluarga besar LPM Peristiwa FH ULM yang selalu memberikan motivasi kepada peneliti

Sepenuhnya peneliti menyadari bahwa segala kebaikan dan pertolongan yang diberikan semua pihak tersebut tidak dapat dibalas oleh peneliti kecuali memohon keridhoan Yang Maha Kuasa agar kiranya bantuan tersebut dapat berbuah pahala dan mendatangkan fitrah bagi kita semua. Akhirnya besar harapan peneliti semoga Tesis ini dapat bermanfaat baik bagi peneliti sendiri maupun bagi pihak-pihak lain. Juga besar harapan peneliti agar Tesis ini dapat memberikan manfaat ditengah-tengah perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Banjarmasin, 26 Juli 2023
Hormat Peneliti,

FAISAL, S.H.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	11
E. Tinjauan Teori dan Pustaka	12
F. Metode Penelitian	26
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penelitian	33
BAB II DAPAT TIDAKNYA HAK PEKERJA DIDAHULUKAN SEBAGAI PENERAPAN ASAS TERKAIT HAK PEKERJA PADA PERUSAHAAN YANG PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG	35
A. Akibat Dari Perusahaan yang Dinyatakan Pailit	35
B. Kedudukan Hak Pekerja Ketika Perusahaan Dinyatakan Pailit Berdasarkan Asas Terkait Hak Pekerja Pada Perusahaan yang Pailit	51
BAB III LANGKAH HUKUM JIKA PARA PIHAK TIDAK MEMENUHI HAK PEKERJA SEBAGAIMANA MESTINYA	71
A. Hak-Hak Pekerja pada Perusahaan Pailit	71
B. Langkah Hukum yang Dapat Dilakukan Pekerja Untuk Mendapatkan Haknya dari Perusahaan Yang Pailit	81
BAB IV PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	